

# **PERANAN HAKIM DALAM USAHA MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK YANG BERSENGKETA DITINJAU DARI PASAL 154 AYAT (1) RBG DI PENGADILAN NEGERI KLAS I KUPANG**

*The Role of The Judge in Reconciling Disputing Parties  
Reviewed from Article 154 Section (1) RBg in The First Class  
of District Court of Kupang*

Soleman Kette<sup>1</sup> dan R.M. Sudikno Mertokusumo<sup>2</sup>

*Program Studi Ilmu Hukum*

*Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

## **ABSTRACT**

The research concerns the Role of the Judge in Reconciling Disputing Parties Reviewed from Article 154 section (1) RBg in the First Class of District Court of Kupang. It is a normative research, which aims to know how the judges of the first of District court of Kupang attempt to reconcile disputing parties.

Primary and secondary data were obtained from library research and field research using document study, questionnaire and interview as data collecting instruments. The data were analysed qualitatively.

The research results show that the number of lawsuits registered at the First Class of District Court of Kupang during 1999 to 2003 period are 606 composed of 272 divorce lawsuits, 162 land lawsuits, 84 lawsuits over compensation for conducts against the law, 24 inheritance lawsuits, 24 failure of responsibility lawsuits, 10 loan lawsuits, and 30 other miscellaneous lawsuits. Of 606 lawsuits registered in the court, 476 lawsuits are settled with a decision after the trial, 9 lawsuits are settled with mutual agreement, and the rest of 121 lawsuits are settled with other approaches. If these settlements are related to the role of the judge, it is noted that the judge in the First Class of District Court of Kupang has always tried to settle the cases through mutual agreement (reconciliation) between the parties. The factors for bigger number of settlement with court decision than that with mutual agreement approach are the lack of goodwill from both disputing parties and the lawyer, and the poor understanding of the disputing parties. The goodwill here is subjective in nature, coming out from one's inner conscience, and the measure to see whether the parties' understanding is poor or good is their latest education. The education of the parties is elementary school or its equivalence (58%), junior high school (24%), senior high school (10%), and university (8%).

**Key words :** *role of the judge, reconciliation.*

<sup>1</sup> *Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

## PENGANTAR

Dalam pemeriksaan perkara perdata di muka sidang Pengadilan Negeri, ketua majelis hakim diberi wewenang untuk menawarkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa, hal dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG/130 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa: Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Tawaran perdamaian dimaksud dapat diusahakan oleh hakim sepanjang pemeriksaan perkara atau sebelum hakim menjatuhkan putusan, bahkan dapat diusahakan sampai pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Jadi dalam hal ini perdamaian tidak hanya ditawarkan pada hari sidang pertama, melainkan pada setiap kali persidangan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara pada dasarnya datang dari para pihak, karenanya pihak-pihak itu sendiri yang dapat mengakhiri sengketa mereka secara damai dengan perantaraan majelis hakim di muka sidang Pengadilan.

Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, maka oleh hakim dibuatlah *akta perdamaian* yang isinya sesuai dengan kehendak para pihak dan kedua belah pihak di hukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 130 ayat 2 HIR jo. M.A. Tanggal. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1972), sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding (Pasal 130 ayat (3) HIR).

Oleh karena akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya pun sama dengan cara melaksanakan putusan pengadilan. Apabila ada pihak yang kemudian tidak bersedia melaksanakan isi akta perdamaian itu secara suka rela, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Negeri; dan kalau perlu dengan bantuan polisi dan angkatan bersenjata lainnya.

Hal ini disebabkan karena perdamaian itu terwujud atas kehendak kedua belah pihak sendiri. Dengan dikeluarkannya akta perdamaian ini, maka perkara atau sengketa diantara para pihak dianggap telah selesai. Apabila suatu waktu perkara tersebut diajukan kembali oleh salah satu pihak atau oleh ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya, maka gugatan itu akan dinyatakan "*nebis in idem*" dan tidak akan diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: "Bagaimanakah pelaksanaan usaha hakim Pengadilan Negeri Kupang didalam menawarkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa ?".

## **CARA PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (Kepustakaan). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, laporan dan bahan hukum tersier seperti Kamus dan lain-lain (Soemitro, 1988: 11).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi tentang Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kupang**

Proses penyelesaian setiap sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Kupang, secara yuridis dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pengadilan, karena berhubungan dengan kedudukannya sebagai salah satu Badan peradilan Umum. Tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kupang sejak periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 telah menerima dan menyidangkan sebanyak 606 sengketa perdata . Dari 606 sengketa perdata yang diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut. Sengketa perdata yang terdaftar dan diajukan pada tahun 1999 adalah berjumlah 140 (23.1 %), untuk tahun 2000 berjumlah 137 (22.6 %), tahun 2001 berjumlah 130 (21.5 %), tahun 2002 berjumlah 117 (19.3 %), dan tahun 2003 berjumlah 82 (13.5 %) sengketa.

Untuk lebih jelasnya mengenai sengketa perdata yang terdaftar dan disidangkan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dapat dikategorikan berdasarkan jenis sengketanya sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Sengketa Perdata Yang Terdaftar dan Disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang (Keadaan Tahun 1999- 2003)

NO	Jenis Perkara	Terdaftar	Putusan	Damai	S i s a	Ket
01	T a n a h	162	123	3	36	
02	W a r i s a n	24	14	-	10	
03	Hutang Piutang	10	9	1	-	
04	Wanprestasi	24	22	-	2	
05	Perceraian	272	225	-	47	
06	Ganti Rugi	84	66	4	14	
07	Lain-lain	30	17	1	12	
	J u m l a h	606	476	9	121	

Sumber Data : Pengadilan Negeri Klas I Kupang.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa sengketa perceraian merupakan angka tertinggi, yaitu 272 yang diselesaikan dengan putusan sebanyak 225 atau 82,7 %, damai tidak ada, dan sisanya yang belum diselesaikan sebanyak 47 perkara menjadi atau 17,3 %. Kemungkinan sisa sengketa yang sebanyak 47 sengketa, akan cenderung untuk diselesaikan dengan cara biasa, indikasinya menurut peneliti, karena dari semua sengketa yang ada sebanyak 272 yang telah diputus sebanyak 225. Sedangkan damai tidak ada, sehingga menunjukkan mobilitas hakim dalam mendamaikan para pihak tidak ada, kemungkinan ini menunjukkan, bahwa hakim dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia, jenjang pendidikan, baik yang mengatur tentang cara mendamaikan para pihak tidak cukup melakukannya. Lihat misalnya pengaturannya, bahwa hakim hanya menyampaikan kepada para pihak untuk berdamai atau tidak, pada sidang pertama saja (pendekatan formalistis – peraturan perundang-undangan yang ada).

Sengketa tanah sebanyak 162 yang diselesaikan dengan putusan sebanyak 123, dan yang dapat didamaikan sebanyak 3 sengketa. Jika dilihat, maka prosentase dari 162 sengketa dengan putusan biasa 123

sengketa atau mencapai 75,9 %, sedangkan prosentase dari 3 sengketa yang berhasil didamaikan hanya mewakili 1,8 %, dan sisanya yang belum diselesaikan yaitu 36 sengketa menjadi 22,2 %.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebanyak 84 sengketa, telah diselesaikan dengan putusan sebanyak 66 atau 78,6 %, yang dapat didamaikan 4 sengketa atau 4,76 % dan sisanya adalah 14 atau 16,6 %. Sengketa warisan dari 24 sengketa yang terdaftar, maka 14 sengketa diselesaikan dengan putusan atau 58,3 %, sedangkan para pihak tidak ada yang damai, dan sisanya sebanyak 10, atau 41,7 %. Sengketa wanprestasi dari 24 sengketa, maka sebanyak 22 diselesaikan dengan putusan dengan mewakili 91,7 %, sedangkan para pihak yang berdamai tidak ditemukan dalam sengketa itu, dan sisanya adalah 2 sengketa yang berarti mewakili 8,3 % dari keseluruhan sengketa yang terdaftar.

Hutang piutang dari 10 sengketa yang terdaftar, maka sebanyak 9 sengketa diselesaikan dengan putusan, hal ini berarti mewakili 90 %, sedangkan para pihak yang berdamai hanya ditemukan 1 sengketa, yang berarti mewakili 10 % dari keseluruhan sengketa yang terdaftar. Sengketa lain-lainnya, dari 30 yang terdaftar, maka yang dilakukan dengan putusan sebanyak 17 sengketa atau 56,7 %, sedangkan yang dapat didamaikan adalah sebanyak 1 sengketa atau 3,3 %, dan sisanya masih 12 sengketa, yang berarti mewakili 40 % dari keseluruhan sengketa yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas I Kupang.

Jika dijumlah secara keseluruhan, maka jumlah sengketa yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Kupang pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebanyak 606 sengketa. Dari jumlah tersebut setelah disidangkan telah diselesaikan dengan putusan sebanyak 476 sengketa atau mewakili 78,5 %, damai sebanyak 9 sengketa atau 1,5 %, dan sisanya sebanyak 121 sengketa atau 20 %. Jadi keseluruhan sengketa perdata dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebanyak 606 sengketa yang telah diselesaikan dengan putusan sebanyak 476 atau mewakili 78,5 % dari keseluruhan sengketa, damai sebanyak 9 sengketa atau 1,5 %, sisanya sebanyak 121 sengketa atau 20 %.

Berdasarkan pada data tersebut di atas, maka para pihak yang dapat didamaikan persinya sangat kecil (1,5 %) dari keseluruhan sengketa yang terdaftar. Jumlah tersebut tidak mewakili keseluruhan jumlah 606 sengketa yang terdaftar, sedangkan yang diselesaikan dengan putusan cukup besar jumlahnya (78,5 %), dan sisa sengketa yang masih ada adalah 20 %.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa usaha dari hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa

terlihat masih rendah. Keadaan tersebut disebabkan karena berbagai faktor yaitu baik secara formal yaitu peraturan perundang-undangan yang melandasi tentang orientasi mendamaikan para pihak, maupun fakta di lapangan yaitu hakim, para pihak, pengacara, ataupun faktor lain, misalnya kondisi sosial budaya masyarakat. Suatu kenyataan yang menunjukkan, bahwa jalan damai melalui pengadilan bagi para pihak sukar tercapai.

Rendahnya penyelesaian sengketa perdata dengan cara damai menurut Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Bapak I Gusti Made Antara, S.H, disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

"terbatasnya kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang, rendahnya tingkat kesadaran hukum dari para pihak, tidak adanya etika baik dari para pihak maupun pengacara, dan faktor sosial budaya dari para pihak yang cenderung lebih mengutamakan harga diri mereka di mata masyarakat, walaupun dalam berperkara biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai objek sengketa". (Hasil Wawancara tanggal, 3 Desember 2003).

Menurut pendapat penulis, bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim dikatakan terbatas karena dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, hanya menghendaki agar hakim dapat membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi dalam hal ini hakim tidak boleh menentukan luas dari pokok perkara; dalam arti tidak boleh menambah atau menguranginya.

### **Peranan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Usaha Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa**

Penyelesaian suatu sengketa perdata dengan cara damai merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut menghendaki pula adanya suatu peranan yang penting dari pengadilan untuk membantu para pihak pencari keadilan, khususnya dalam perkara perdata, sebagaimana sebutkan, bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Dalam hubungannya dengan ketentuan tersebut di atas, maka

berdasarkan data lapangan sebagaimana tertera pada tabel 3 diatas, bahwa selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, sengketa yang terdaftar dan telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, sebanyak 606 sengketa perdata yang didalam penyelesaiannya telah ditempuh dengan putusan pengadilan sebanyak 476 sengketa, damai 9 sengketa dan sisanya adalah 121 sengketa.

Dari 606 sengketa yang terdaftar tersebut terdiri dari 162 sengketa tanah, di mana yang berhasil diselesaikan secara damai sebanyak 3 sengketa, 126 sengketa dengan putusan pengadilan, hutang piutang dari 10 sengketa yang berhasil didamaikan 1 sengketa, 14 sengketa diselesaikan dengan putusan pengadilan, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dari 84 sengketa yang berhasil didamaikan 4 sengketa, 66 sengketa diselesaikan dengan putusan pengadilan dan sengketa lain-lain sebanyak 30 sengketa dan yang berhasil didamaikan 1 sengketa, 17 sengketa diselesaikan dengan putusan pengadilan, sedangkan untuk sengketa warisan yang berjumlah 24 sengketa, wanprestasi 24 sengketa dan perceraian 272 sengketa; ketiga jenis sengketa ini tidak ada satupun yang para pihaknya berhasil didamaikan.

Menurut bapak Yosef F.E. Fina, S.H, sebagai salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, bahwa tidak tercapainya perdamaian pada sengketa warisan disebabkan karena pihak tergugat yang biasanya adalah anak laki-laki tertua (sulung) beranggapan bahwa pembagian warisan yang dilakukan telah sesuai dengan kebiasaan adat setempat sehingga ia tidak bersedia untuk menempuh jalan damai, sedangkan untuk sengketa wanprestasi di mana pihak debitur terlambat melakukan kewajibannya, sehingga pihak penggugat (kreditur) tetap tidak bersedia untuk menempuh jalan damai ". (Hasil wawancara tanggal, 4 Desember 2003).

Ketentuan mengenai perdamaian pada gugatan perceraian diatur khusus dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan, bahwa:

Ayat(1) Hakim yang memeriksa gugata perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Jadi dari ketentuan tersebut, sebenarnya undang-undang telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada hakim yang memeriksa sengketa tersebut untuk mengusahakan penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan. Namun, fakta menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun dari 272 sengketa

perceraian tidak ada satu sengketaupun yang berhasil didamaikan.

Menurut bapak I Gusti Made Antara, S.H, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kupang bahwa tidak tercapainya perdamaian pada sengketa perceraian lebih disebabkan karena apa yang menjadi alasan dari pihak yang mengajukan perceraian merupakan masalah yang sangat prinsip, yaitu di mana salah satu pihak (suami/istri) menjalin hubungan dengan orang lain (selingkuh). (Hasil wawancara tanggal 4 Desember 2003).

Berbicara mengenai masalah putusnya perkawinan karena perceraian, maka bagi mereka yang beragama Kristen, baik kristen protestan dan terutama bagi yang beragama kristen katolik, putusnya perkawinan karena perceraian merupakan satu hal yang bertentangan dengan ajaran agama; karena dalam Kitab Suci (Alkitab) disebutkan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia (Markus 10 ayat 9).

Adapun 9 (sembilan) sengketa perdata yang penyelesaiannya dapat ditempuh dengan jalan damai, terdiri dari:

1. Sengketa Tanah.

Sengketa tanah yang berhasil didamaikan berjumlah 3 sengketa, yaitu:

- a. Sengketa dengan register Nomor : 78/Pdt/G/2000/PN Kpg.
- b. Sengketa dengan register Nomor : 139/Pdt/G/2001/PN.Kpg
- c. Sengketa dengan register Nomor : 31/Pdt/G/2002/PN Kpg

2. Sengketa Hutang Piutang

Sengketa Hutang Piutang yang berhasil didamaikan berjumlah 1 sengketa yaitu sengketa dengan register Nomor : 08/Pdt/G/2003/PN. Kpg.

3. Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum

Sengketa Ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum yang berhasil didamaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Kupang, terdiri dari:

- a. Sengketa Perdata register Nomor : 131/Pdt/G/1999/PN Kpg;
- b. Sengketa dengan register Nomor: 27 /Pdt/G/2000/PN. Kpg.
- c. Sengketa dengan Register Nomor: 43/Pdt/G/2000/PN. Kpg.
- d. Sengketa Perdata Nomor: 14/Pdt/G/2001/PN. Kpg.

4. Sengketa Lain-lain

Sengketa lain-lain yang berhasil ditempuh dengan jalan damai pada Pengadilan Negeri Kupang adalah sengketa Perdata No. 76/Pdt/G/2000/PN Kpg.

Sehubungan dengan 9 sengketa yang berakhir dengan perdamaian, apabila dianalisis menunjukkan bahwa 3 sengketa tanah dapat diselesaikan dengan jalan damai karena antara para pihak yang bersengketa masih mempunyai hubungan darah (keluarga) sehingga



para pihak bersepakat memilih penyelesaian secara damai. Jadi peranan hakim pada sengketa tanah tersebut dapat dikatakan tidak ada.

Sengketa hutang piutang dapat berakhir dengan perdamaian karena pihak debitur (tergugat) berjanji akan membayar hutangnya kepada pihak penggugat dengan cara angsuran (mencicil). Selanjutnya untuk 3 sengketa perbuatan melawan hukum dapat berakhir dengan perdamaian karena pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hal ini pihak tergugat bersedia membayar ganti kerugian setelah besarnya ganti rugi tersebut disetujui oleh pihak penggugat tentang besarnya ganti tersebut, sedangkan 1 sengketa perbuatan melawan hukum dapat berakhir, dimana pihak penggugat (PT. Waskita Karya) karena pertimbangan keamanan dan kelancaran usahanya (ekonomi) bersedia meningkatkan perjanjian yang semula berupa sewa beli tanah dengan pihak pewaris dari para tergugat (ahli waris) menjadi perjanjian jual beli tanah dengan harga yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Kupang dapat diselesaikan dengan perdamaian lebih disebabkan karena adanya inisiatif dari para pihak yang bersengketa itu sendiri dengan berbagai pertimbangan.

Di lain pihak hakim menyadari bahwa penyelesaian suatu sengketa perdata dengan cara damai adalah sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh bapak I Gusti Made Antara, SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kupang, bahwa:

"penyelesaian sengketa secara damai sangat penting dan bermanfaat bagi para pihak, karena itu dalam memeriksa setiap sengketa perdata, pada sidang hari pertama selalu ditawarkan kepada para pihak penyelesaian sengketa mereka dengan jalan damai, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tawaran perdamaian terkadang tidak hanya terbatas pada sidang pertama tetapi sering dilakukan setiap kali diadakan persidangan, namun usaha untuk mendamaikan mereka selalu tidak berhasil yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang akan berpengaruh pada kesadaran hukum, budaya dan adanya pengaruh dari pihak ketiga ataupun dari pengacara/kuasa hukum para pihak itu sendiri". (Hasil Wawancara Tanggal, 3 Desember 2003).

Penyelesaian sengketa secara damai menurut penulis sangat penting tidak saja untuk menghindari proses persidangan yang berlarut-larut dan biaya yang mahal serta para pihak akan memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*), tetapi yang utama adalah mencegah kemungkinan terjadinya permusuhan yang berkepanjangan

di antara para pihak yang bersengketa, terutama bagi mereka yang masih mempunyai hubungan keluarga karena adanya putusan hakim yang menyatakan salah satu pihak kalah dan pihak yang lain menang.

Penyelesaian sengketa dengan putusan pengadilan yang dalam dictumnya menetapkan pihak yang berhak atau benar atas pokok perselisihan merupakan proses berakhirnya persidangan suatu sengketa. Namun hal itu tidak mengakhiri perselisihan atau permusuhan di antara para pihak, karena itu penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu sengketa dan perselisihan ataupun permusuhan diantara para pihak, karena akan memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Faktor yang menyebabkan lebih banyaknya sengketa yang diselesaikan atau berakhir dengan putusan pengadilan dibandingkan penyelesaian dengan cara perdamaian, adalah:

1. Kurang adanya iktikad baik dari para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukum mereka. Iktikad baik yang dimaksudkan dalam penulisan adalah iktikad baik yang bersifat subjektif yang bersumber pada sikap bathin seseorang. Sikap bathin ini menjadi dasar perbuatan yang dilakukan dan harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan pihak lainnya.
2. Rendahnya pemahaman dari para pihak yang bersengketa. Rendahnya tingkat pemahaman dari para pihak tentang arti dan maksud dari penyelesaian suatu sengketa secara damai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya perdamaian yang ditawarkan oleh majelis hakim.

Adapun yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan rendahnya tingkat pemahaman dari para pihak dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, dimana tingkat pendidikan dari para yang bersengketa adalah SD atau sederajat (58 %), SLTP (24 %), SLTA (10 %) dan Sarjana (8 %).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Kupang pada setiap kali diadakan persidangan sengketa perdata selalu berusaha menawarkan kepada para pihak penyelesaian sengketa dengan jalan damai, namun fakta menunjukkan bahwa selama lima tahun (1999-2003) dari 606 sengketa perdata yang terdaftar, penyelesaian sengketa dengan putusan pengadilan lebih banyak yaitu berjumlah 476 sengketa (78,5 %)

dibandingkan dengan penyelesaian secara damai yang berjumlah 9 sengketa (1,5%) dan sisanya sebanyak 121 sengketa (20 %) yang penyelesaiannya kemungkinan akan berakhir dengan putusan pengadilan.

Faktor yang menyebabkan lebih banyaknya sengketa yang diselesaikan atau berakhir dengan putusan pengadilan dibandingkan penyelesaian dengan cara perdamaian, adalah:

1. Kurang adanya iktikad baik dari para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukum mereka. Iktikad baik yang dimaksudkan adalah iktikad baik yang bersifat subjektif yang bersumber pada sikap bathin seseorang. Sikap bathin ini menjadi dasar perbuatan yang dilakukan dan harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan pihak lainnya.
2. Rendahnya pemahaman dari para pihak yang bersengketa. Rendahnya tingkat pemahaman dari para pihak tentang arti dan maksud dari penyelesaian suatu sengketa secara damai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya perdamaian yang ditawarkan oleh majelis hakim.

#### S a r a n

1. Majelis hakim yang menyidangkan suatu sengketa harus sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa.
2. Majelis hakim yang berhasil menyelesaikan suatu sengketa dengan cara perdamaian harus diberi penilaian atau penghargaan khusus bagi peningkatan kariernya.
3. Tawaran perdamaian oleh majelis hakim kepada para pihak yang bersengketa sebaiknya dilakukan setelah adanya proses jawab menjawab antara tergugat dan penggugat, karena saat itulah hakim baru dapat mengetahui secara jelas duduk perkara atau sengketa yang sebenarnya dan kondisi objektif dari para pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi-, 1995, *Managament Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta Jakarta.
- Harahap, Krisna-, 2000, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Serta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno-, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- , 2001, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir-, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, H-, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono-, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Subekti, R-, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung
- Soeroso, R-, 1990, *Praktik Hukum Acara Perdata Contoh Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang Kepengacaraan Perdata*, Sinar Grafika, Bandung.
- Soepomo, R-, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan-, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sumardjono SW Maria, 1997, *Pedoman Pembuatan Usul Penelitian*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Usman Rachmadi-, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro, R-, 1984, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Bidara, O-, 1984, *Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d 245 HIR di bandingkan dengan Pasal 142 s/d 314 RBg*, Pradnya Paramita, Bandung.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.